



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S

A N

NOMOR : 60/G/2009/PTUN.Smg.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : PT.  
PERMATA;-----

Alamat : Jl. Parangtritis Km. 4.2 Sewon, Bantul  
Yogyakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : DIAH  
AGUSTINA;-----

Kewarganegara : Indonesia;-----

an  
Tempat : Tukangan Kulon No. 61 Kelurahan  
Tinggal Kemirirejo RT. 002 RW.009 Kecamatan  
Magelang Tengah Kota  
Magelang;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT.

2. Nama : PERMATA;-----  
BAGIO  
WIBOWO;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m  
Kewarganegaraan-----

Kewarganegar : Indonesia;- -----

aan

Tempat : Jl. Jengala No. 49 Kelurahan Magersari

tinggal RT. 02 RW. 009 Kecamatan Magelang

Pekerjaan : Tengah Kota Magelang;- --  
Direktur PT.

PERMATA;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2009  
memberikan kuasanya kepada:

Nama : 1. SUTRISNO,  
SH.MH.;- -----

2. MOCH. AMIN SUBAGIONO,  
SH;- -----

3. A. ZAENAL ABIDIN,  
SH.M.Kn;- -----

4. ANI TRIWATI,  
SH.MH;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia;- -----

Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jl. Zebra Tengah No. 23

Semarang;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT**- -----

-

**M E L A W A**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N - - - - -

Nama Jabatan : BUPATI

MAGELANG;- - - - -

Tempat Kedudukan : Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid

Magelang;- - - - -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2009

memberikan kuasanya kepada:

Nama : HJ. ASIH BUDIASTUTI,

SH.CN;- - - - -

Kewarganegaraan : Indonesia;- - - - -

Pekerjaan : Advokat;- - - - -

Alamat : Jl. Mangga VI No. 18

Semarang;- - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**;- - - - -

--

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;- - - - -

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara ; - - - - -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang tertanggal 10 Nopember 2009 Nomor :

**60** /Pen.A.PMH /G/2009/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut;- - - - -

- - - - -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis 11 Nopember

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor : 60 / Pen.P.Pers / 2009 / PTUN.Smg. tentang Hari  
Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 11 November  
2009;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal  
25 November 2009 Nomor : 60 / Pen.HS / 2009 / PTUN.Smg.  
tentang Hari Sidang Perkara yaitu pada hari Rabu tanggal 2  
Desember  
2009;- -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang, bahwa** Penggugat telah mengajukan gugatan  
tertanggal 6 Nopember 2009 yang diterima dan terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada  
tanggal 6 Nopember 2009 dibawah register perkara Nomor :  
60/G/2009/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 25  
Nopember 2009, yang isi selengkapnya sebagai  
berikut:- -----

1. Bahwa Penggugat (PT. PERMATA) sebagai Badan Hukum  
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
Nomor : 110 tanggal 26 April 2004 yang telah mendapatkan  
pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : C-13858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 4 Juni 2004,  
diubah dengan Akta No. 15 tanggal 6 September 2004 yang  
telah dilaporkan dan diterima serta dicatat oleh Menteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-28292  
HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Nopember 2004, kemudian diubah  
dengan Akta Nomor : 08 tanggal 12 Nopember 2007 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-06326 HT.01.04.TH.2007 tanggal 12 Desember 2007, kemudian diubah dengan Akta Nomor : 23 tanggal 30 April 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-27534.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008, yang kemudian diubah dengan Akta Nomor : 20 tanggal 14 Juli 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-47033.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 Agustus 2008, sehingga menurut hukum PT. PERMATA adalah merupakan Badan Hukum Perdata yang sah (bukti P-2 sampai dengan P-11);- -----

2. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata yang sah dalam rangka mendukung Pemerintah dalam program konversi minyak tanah ke Elpiji bagi masyarakat Kabupaten Magelang dan untuk memberikan lapangan pekerjaan sebagian masyarakat dilingkungan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) serta untuk memberikan kontribusi pendapatan Daerah Kabupaten Magelang, Penggugat telah mengajukan Permohonan Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji di Dusun Pedak, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang di atas tanah milik DIAH AGUSTINA (Direktur Utama PT. PERMATA) kepada Pertamina, dan atas permohonan tersebut Pertamina telah memberikan Persetujuan Ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip kepada Penggugat dengan Surat No.230/F10000/2008-S3 tanggal 12 Pebruari 2008, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji mini untuk Pengisian LPG 3 Kg dan Persetujuan Lokasi dengan Surat No.1322/F10500/2008-S3 tanggal 14 Mei 2008, Perihal Persetujuan Lokasi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji PT. PERMATA di Kabupaten Magelang-Jawa Tengah (bukti P-12 dan P-13);- -----

3. Bahwa dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji No.230/F10000/2008-S3 tanggal 12 Pebruari 2008 dari Pertamina tersebut, Penggugat mengajukan permohonan persetujuan pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji yang terletak di ~~Desa~~ Pedak, -Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang kepada Tergugat dan atas permohonan tersebut, Tergugat telah memberikan persetujuan kepada Penggugat dengan mengeluarkan Surat Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tanggal 9 April 2008, Perihal Persetujuan Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), yang diralat oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang dengan Surat Keterangan Nomor : 1884/864/34/08 yang menerangkan bahwa Persetujuan Bupati Magelang tentang Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang beralamat di Dusun Pedak, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tertanggal 9 Maret 2008, TERDAPAT KESALAHAN DALAM PENULISAN TANGGAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera 9 Maret 2008 untuk itu diralat yang benar adalah tanggal 9 April 2008 (bukti P-14 dan P-15);- -----

4. Bahwa Surat Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tanggal 9 April 2008, Perihal Persetujuan Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) kepada DIAH AGUSTINA, Tukangan Kulon No.61, RT.002/001, Magersari, Magelang yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memuat ketentuan, antara lain : 1) Pemohon diwajibkan mengajukan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (PTPGT) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang; 2) Diwajibkan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Reklame di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang; 3) Membuat dokumen UKL/UPL;- -----

5. Bahwa dengan adanya kewajiban bagi Penggugat untuk mengurus surat-surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tanggal 9 April 2008 tersebut, maka Penggugat telah mengurus dan memperoleh surat-surat berupa : Keterangan Perolehan Dan Penggunaan Tanah Nomor : 460/24/KPPT/VI/BPN/2008 tanggal 9 Juni 2008 berikut lampiran berupa Peta Lokasi Tanah Yang Diberikan Keterangan Perolehan Dan Penggunaan Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/640/2094/Kep/34/2008 tanggal 7 Agustus 2008,  
6. Bahwa -----  
Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha Nomor :  
188.4/504/2111/Kep/34/2008 tanggal 8 Agustus 2008, Surat  
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :  
65.722'04/SIUP/II/2006 tanggal 2 Maret 2006, Tanda Daftar  
Perusahaan (TDP) tanggal 11 Agustus 2008 dan dokumen  
UKL/UPL ( bukti P-16, P-17, P-18,  
P - 19, P-20 dan P-  
21);- -----  
-----

6. Bahwa Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha  
yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana  
Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008  
tanggal 8 Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan  
(HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA, telah  
tenyata oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2009 dicabut  
dengan menerbitkan Keputusan Nomor :  
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang  
Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.4/504/211/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan  
(HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA (bukti P-  
1 dan P-18);- -----

7. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Nomor :  
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang  
Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan  
(HO) Dan Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setelah Penggugat menerima Keputusan tersebut yang dikirim oleh Tergugat melalui Pos pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1854/59/2009 tanggal 11 Agustus 2009 kepada PT. PERMATA (bukti P-22). Oleh karena Penggugat mengetahui adanya Keputusan obyek sengketa pada tanggal 12 Agustus 2009, maka menurut hukum gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

8. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA adalah merupakan salah satu syarat bagi Penggugat dalam usaha pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji. Penggugat dalam usaha , pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji, telah melaksanakan kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji di Jalan Letnan Tukiyat, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Oleh karena Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha adalah merupakan salah satu syarat bagi Penggugat dalam usaha pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dan Penggugat telah melaksanakan kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Bulk Elpiji tersebut, maka dengan diterbitkannya Keputusan Elpiji Tergugat Nomor :

188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :

188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan

(HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA, Penggugat

telah dirugikan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun

2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;- -----

9. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor :

188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :

188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan

(HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA adalah

didasarkan pada pertimbangan hukum atau konfirmasi hukum,

yaitu :- -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan

Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 4 Tahun 2005,

tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha,

izin yang diberikan didasarkan pada keterangan/data yang

tidak benar dapat

dicabut;- -----

-----

b. Bahwa PT. PERMATA selaku pemegang Izin Gangguan (HO)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Izin Tempat Usaha pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang terletak di Dusun Pedak, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, memberikan keterangan/data tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunan SPPBE tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi;- -----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha a.n PT. PERMATA;

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang didasarkan pada pertimbangan hukum atau konfirmasi hukum dalam konsideran pada Bagian Menimbang huruf (b), mengenai *"keterangan/data tidak benar yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunan SPPBE tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi"* adalah mendasarkan atau merujuk pada syarat-syarat permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha untuk **Perusahaan Non Industri** yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) 3. Fotocopy -----  
huruf (b) Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin

Gangguan Dan Izin Tempat Usaha telah memuat ketentuan

sebagai

berikut:- -----

(1) Syarat- syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud

Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai

berikut:- -----

b. Untuk Perusahaan Non

Industri .-----

-----

1. Gambar Letak

Usaha;- -----

-----

2. Fotocopy KTP Pimpinan/Pemilik

Perusahaan;- -----

3. Fotocopy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang  
berbadan hukum atau Anggaran Dasar yang sudah  
disahkan bagi Koperasi;- -----

4. Fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB) tahun terakhir sesuai tempat peruntukan  
tanah/penggunaan sebagai lahan  
industri;- -----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Sertipikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan /penguasaan atas tanah;- -----

-

6. Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi;- -----  
Daerah -----  
-----

7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pemohon/pembuatan dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;- -----  
-----

12. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, pada dasarnya telah menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa permohonan izin gangguan dan izin tempat usaha untuk Perusahaan Non Industri disyaratkan adanya : **"Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi"**;- -----

13. Bahwa persyaratan adanya **"Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi"** dalam permohonan izin gangguan dan izin tempat usaha untuk Perusahaan Non Industri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, menurut hukum adalah bersifat alternatif. Oleh karena syarat "*persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi*" yang ditentukan dalam Paraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha bersifat alternatif, maka menurut hukum Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha dapat diterbitkan/dikeluarkan **hanya** atas dasar adanya syarat "*persetujuan tertulis para tetangga yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi*" saja, ataupun dapat diterbitkan/dikeluarkan **hanya** atas dasar adanya syarat "*persetujuan tertulis masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi*" saja ; - - -

14. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Paraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, yang mengatur adanya syarat "*persetujuan tertulis*" bersifat alternatif, namun Penggugat dalam mengajukan permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha kepada Tergugat telah melengkapi persyaratan, baik "*persetujuan tertulis*" para tetangga (pemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunan Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji, yaitu Mukobilal, Sukarjo dan Suharyanto), **maupun** "*persetujuan tertulis*" masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi, yaitu berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang berisi pernyataan : *"Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku ketua RT/RW, Ka. Dusun dan KADES Bumirejo Kec. Mungkid, Kab. Magelang dengan ini menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan adanya pembangunan SPPBE PT. PERMATA di lingkungan (wilayah kami) yaitu jalan Letnan Tukiyat, Desa Bumirejo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang Jawa Tengah guna mendukung program pemerintah dalam bidang konversi minyak tanah ke elpiji"* (bukti P-23);- ----- masyarakat-----

15. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan permohonan Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha kepada Tergugat selain telah melengkapi syarat "persetujuan tertulis" para tetangga (pemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunan SPPBE, yaitu Mukobilal, Sukarjo dan Suharyanto), juga telah melengkapi syarat "persetujuan tertulis " masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi (Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2008), maka adanya keterangan/data pemilik tanah yang berbatasan dan berada di sekitar rencana pembangunan Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji (tanah milik Mukobilal, Sukarjo dan Suharyanto) tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi, menurut hukum tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atau alasan hukum Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa, mengingat masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelengkapan syarat "persetujuan tertulis" masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi - Apabila ----- berupa Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2008 yang diajukan oleh Penggugat, yang merupakan syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha;- -----

16. Bahwa tata cara dan proses pemberian Izin Gangguan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, pada dasarnya telah menyebutkan:- -----

- Terhadap permohonan Izin Gangguan yang diajukan wajib dilakukan pemeriksaan /peninjauan lokasi oleh Tim ;-----

- Tim terdiri dari Instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Bupati ;-----

- Hasil pemeriksaan/peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Tim dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;- -----

- Hasil pemeriksaan/peninjauan lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim sebagai salah satu dasar pertimbangan Bupati untuk menerbitkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak

permohonan

izin ; - - - - -

- Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan berdasarkan pemeriksaan/peninjauan lokasi oleh Tim dan Tim menyatakan tidak keberatan, maka permohonan

diproses; - - - - -

- Jangka waktu penerbitan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; - - - - -

- Keputusan pemberian izin diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; -

- Izin diterbitkan dan diberikan setelah pemohon membayar retribusi yang ditetapkan; - - - - -

- - - - -

17. Bahwa sesuai tata cara dan proses pemberian Izin Gangguan, Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tanggal 8 Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA, Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pencermatan dan penelitian secara seksama mengenai syarat/data yang diajukan oleh Penggugat maupun telah melakukan pemeriksaan/peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Tergugat dan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan



dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan  
Pengisian -----  
Tergugat untuk memberikan izin. Oleh karena Pemberian Izin  
Gangguan (HO) Dan Tempat Izin Usaha oleh Tergugat kepada  
Penggugat telah memenuhi tata cara dan proses sebagaimana  
ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah  
Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin  
Gangguan Dan Izin Tempat Usaha, maka menurut hukum  
Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang didasarkan  
pada pertimbangan adanya keterangan/data pemilik tanah  
yang berbatasan dan berada di sekitar lokasi tidak sesuai  
dengan kenyataan yang ada di lokasi adalah tidak beralasan  
dan tidak berdasar hukum ; - -----

18. Bahwa mengenai adanya keterangan/data tidak benar  
yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada  
disekitar rencana pembangunan Stasiun Pengisian Dan  
Pengangkutan Bulk Elpiji (Mukobilal, Sukarjo dan  
Suharyanto) tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di  
lokasi, yaitu pemilik tanah yang baru yang berbatasan dan  
berada di lokasi yang sekarang adalah lahan milik Anton  
dan Linawati, pemilik tanah yang baru tersebut yaitu Anton  
dan Linawati pada dasarnya telah menyetujui dan memberikan  
ijin terhadap pendirian dan pembangunan usaha stasiun  
Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji yang dilakukan  
oleh Penggugat (Bukti P - 24, P- 25 dan P - 26);  
-----

19. Bahwa dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke  
LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan Instruksi melalui Surat No. 540/1593 tanggal 10 Agustus 2009, Perihal Pelaksanaan program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Tengah, kepada Bupati/Walikota se Jawa Tengah (bukti P-27), yang memuat hal-hal sebagai berikut:-

“ Menunjuk kembali Surat kami Nomor :541/0887 tanggal 30 April 2009 dan Suat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 2 April 2009 Nomor : 541/1131/SJ perihal Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tahun 2009, bersama ini kami ingatkan kembali hal-hal sebagai berikut:-

- Bahwa program konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Jawa Tengah direncanakan selesai pada tahun 2009, dan diperlukan pula dukungan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di daerah;-
- Bahwa saat ini masih banyak permasalahan di daerah yang menghambat dalam pembangunan SPPBE dan SPBE, untuk itu diminta saudara membantu kemudahan dan kelancaran perijinan guna percepatan pembangunan SPPBE dan SPBE sebagai penunjang pelaksanaan program konversi

“:-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan adanya Instruksi Gubernur Jawa Tengah melalui Surat No. 540/1593 tanggal 10 Agustus 2009, Perihal Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Tengah, kepada Bupati/Walikota se Jawa Tengah, Tergugat seharusnya mau mempertimbangkan kepentingan Penggugat, peraturan dan data-data serta manfaat dari pembangunan Stasiun Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji yang dilakukan Penggugat untuk masyarakat sehingga seharusnya Tergugat tidak sampai pada Keputusan untuk mencabut Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama Penggugat yang telah berlaku kurang lebih 1 (satu) tahun dan pembangunannya telah mulai dilaksanakan oleh Penggugat;
21. Bahwa mengingat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/211/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA telah terbukti bertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha dan bertentangan dengan Azas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum, maka menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa aquo haruslah 2. Menyatakan,-- dan diwajibkan  
untuk dicabut oleh Tergugat;- -----

Berdasarkan pertimbangan dan fakta- fakta hukum tersebut  
di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus dan menetapkan  
sebagai hukum :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
keseluruhan;- -----

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang  
Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan  
(HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT.  
PERMATA;- -----  
-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati  
Magelang Nomor :188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8  
Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang  
Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin  
Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT.  
PERMATA;- -----  
-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
perkara;- -----

Atau;- -----



-----  
Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan  
bijaksana.-----

Pemilik -----

**Menimbang, bahwa** atas gugatan tersebut, pihak Tergugat  
telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Desember 2009 yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

-----  
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan  
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui  
kebenarannya;-----

-----  
4. Bahwa-----

2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan Nomor  
: 188.4/504/ 1846/KEP/59/2009, tanggal 8 Agustus 2009  
tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang  
Nomor:188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian Ijin  
Gangguan (HO) dan ijin Tempat Usaha atas nama PT  
PERMATA ;-----

3. Bahwa dalil Penggugat angka 8 (delapan) mohon ditolak  
oleh Yth Majelis Hakim, karena sebenarnya yang dirugikan  
adalah Tergugat, mengingat Tergugat telah terperdaya  
dengan syarat yang seharusnya telah lengkap dan dipenuhi  
oleh Penggugat yaitu harus ada pernyataan persetujuan dari  
para pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang  
dijadikan tempat usaha, akan tetapi yang dilampirkan oleh  
Penggugat adalah persetujuan pemilik tanah yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan tanah yang dijadikan usaha akan tetapi tanah-tanah tersebut telah dibeli terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga seolah-olah persetujuan tersebut adalah merupakan persetujuan dari pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang dijadikan usaha, **AKAN TETAPI** yang sebenarnya adalah bukan pemilik tanah yang bersebelahan lagi, **SEHINGGA** pemilik tanah yang sebenarnya yang berbatasan/bersebelahan dengan tanah dimana dijadikan tempat usaha sangat keberatan karena tidak dimintai persetujuan oleh Penggugat;- -----

4. Bahwa penerbitan obyek gugatan telah dibenarkan oleh pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 4 Tahun 2005, karenanya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;- --

5. Bahwa benar Tergugat telah pula menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/ 504/2111/Kep/34/2008 tanggal; 8 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha kepada BAGIO WIBOWO atas nama PT. PERMATA;- -----

6. Bahwa pemberian ijin tersebut Tergugat terbitkan mengingat pada saat itu Penggugat telah memberikan data-data yang disyaratkan untuk dapat diterbitkan ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 4 Tahun 2005, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diadakan penelitian/pengecekan ulang, ternyata Data yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak benar yaitu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi

/dilapangan;- -----

-----

7. Bahwa oleh karena permohonan ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha tidak dilengkapi dengan adanya surat keterangan persetujuan dari para pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah dimana dijadikan tempat usaha, maka Tergugat merasa terperdaya karenanya Tergugat menerbitkan obyek sengketa.

-----

-----

8. Bahwa dalil Penggugat angka 8 (delapan) mohon ditolak oleh Majelis Hakim, karena tindakan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Retribusi ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha ;-----

-----

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karenanya tindakan Tergugat dalam hal ini bukanlah merupakan tindakan sewenang-wenang apalagi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik.- -----

10. Bahwa dalil Penggugat angka 9 s/d 21 mohon ditolak oleh Majelis Hakim, karena **Menimbang** ----- dalam menerbitkan obyek gugatan telah jelas dan gamblang, yaitu karena Penggugat dalam memberikan data agar diterbitkan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu telah memberikan data persetujuan dari pemilik tanah yang lama yang bersebelahan dengan tempat usaha namun sebenarnya adalah merupakan milik dari Penggugat sendiri, sehingga para pemiik tanah yang sebenarnya yang berbatasan/bersebelahan dengan tempat usaha merasa keberatan ; - -----

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan bukan berarti Tergugat tidak mendukung Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg, akan tetapi oleh karena Penggugat tidak melengkapi persyaratan permohonan Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha; - -----

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.- -----

-----  
**Menimbang, bahwa** terhadap Jawaban Tergugat di dalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan Replik, dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik;- -----

-----

**Menimbang, bahwa** untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Asli Kuasa - Penggugat-- telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 48 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:

-----

1. P – 1 : Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8  
Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan  
Bupati Magelang Nomor:  
188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang  
Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin  
Tempat Usaha atas nama PT.PERMATA  
( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----
2. P – 2 : Akta Perseroan Terbatas PT. PERMATA Nomor :  
110 tanggal 26 April 2004 yang dibuat oleh  
KUNSRI HASTUTI, SH, Notaris di Magelang  
( Fotocopy sesuai aslinya);- -----
3. P – 3 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13858  
HT.01.01 TH. 2004, tanggal 4 Juni 2004  
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan  
Terbatas PT. PERMATA ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----
4. P – 4 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT.PERMATA Berkedudukan di  
Magelang Nomor: 15 tanggal 6 September 2004  
yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH Notaris  
di Magelang ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----  
-----

5 P – 5 : Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor: C-28292  
HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 November 2004  
Perihal Penerimaan Laporan Akta Perubahan  
Anggaran Dasar PT. PERMATA ( Fotocopy  
sesuai  
aslinya);- -----  
-----

6. P – 6 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para  
pemegang Saham PT. PERMATA Berkedudukan di  
Kabupaten Bantul No. 08 tanggal 12 November  
2007 yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH,  
Notaris di Magelang ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----  
-----

7. P – 7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06326  
HT.01.04.TH.2007 tanggal 12 Desember 2007  
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran  
Dasar PT. PERMATA ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. PERMATA" Nomor: 23 tanggal 30 April 2008 yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH, Notaris di Magelang ( Fotocopy sesuai aslinya);- -----
10. P - 10 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-27534.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. PERMATA ( Fotocopy sesuai aslinya);- -----
- 10 P - 10 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. PERMATA" Nomor: 20 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat oleh KUNSRI HASTUTI, SH, Notaris di Magelang ( Fotocopy sesuai aslinya);- -----
- 11 P - 11 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47033.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. PERMATA ( Fotocopy sesuai aslinya);- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P - - - - 16 - - - - -

12 P - 12 : Surat dari Direktorat Pemasaran dan Niaga  
Senior Vice President Pemasaran PERTAMINA  
No. 230/F10000/2008- S3 tanggal 12 Pebruari  
2008 Perihal Persetujuan Ijin Prinsip  
Pembangunan SPBE Mini untuk Pengisian LPG 3  
Kg PT. PERMATA di Kabupaten Magelang  
Jawa Tengah

( Fotocopy sesuai  
aslinya);- - - - -

13 P - 13 : Surat dari Direktur Pemasaran dan Niaga  
Vice Presiden Gas Domestik PERTAMINA No.  
1322/F10500/2008- S3 tanggal 14 Mei 2008  
Perihal Persetujuan Lokasi SPBE PT. PERMATA  
di Kabupaten Magelang Jawa  
Tengah

( Fotocopy sesuai  
aslinya);- - - - -

14 P - 14 : Surat dari Bupati Magelang Nomor :  
188.4/551.2/129/34/2008 tanggal 9 Maret  
2008 Perihal Persetujuan Pendirian SPPBE  
( Fotocopy sesuai aslinya);- -

15 P - 15 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan  
Terpadu Kabupaten Magelang  
Nomor:1884/864/34/08, ( Fotocopy sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aslinya);- -----

-----  
16 P – 16 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Magelang Nomor :  
460/24/KPPT/VI/BPN/2008 tanggal 9 Juni 2008  
Perihal Keterangan Perolehan dan  
Penggunaan Tanah  
( Fotocopy sesuai  
fotocopynya);- -----

-----  
17 P – 17 : Surat Keputusan Bupati Magelang No.  
188.4/640/2094/Kep/34/2008 tanggal 7  
Agustus 2008 Tentang Izin Mendirikan  
Bangunan (IMB) atas nama PT. PEMATA  
( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

-----  
18 P – 18 : Surat Keputusan Bupati Magelang No.  
188.4/504/2111/Kep/34/2008 tanggal 8  
Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin  
Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas  
nama PT. PEMATA ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

-----  
19 P – 19 : Surat dari Kepala Dinas Perindustrian  
Perdagangan dan Koperasi Nomor:  
65.722'04/SIUP/II/2006 tanggal 2 Maret 2006  
Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  
Besar ( Fotocopy sesuai



aslinya);- -----

-----

20 P – 20 : PT. PERMATA – Kepala Kantor Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Magelang tanggal 11 Agustus 2008  
tentang Tanda daftar Perusahaan  
Perseroan Terbatas PT. PERMATA  
( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

-----

21 P – 21 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan  
Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)  
Pemberitahuan Stasiun Pengisian dan  
Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT.  
PERMATA ( Fotocopy sesuai  
fotocopinya);- -----

22 P – 22 : Surat Pengantar dari Kepala Badan Pelayanan  
Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor:  
045.2/1854/59/2009 tanggal 11 Agustus 2009  
tentang Pengiriman Keputusan Bupati  
Magelang Nomor: 188.4/504/1846/KEP/59/2009  
tanggal 8 Agustus 2009 tentang Pencabutan  
Keputusan Magelang No.  
188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang  
Pemberian Izin Ganggungan (HO) dan Izin  
tempat usaha ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

-----

23 P – 23 : Surat Pernyataan Ketua RT, Ketua RW, Kepala



Dusun dan Kepala Desa Bumirejo tanggal 27  
Mei 2008 sebagai Persetujuan Tertulis

26. P - Masyarakat yang berdekatan dan berada di  
sekitas lokasi yang menyatakan setuju dan  
tidak keberatan Pembangunan SPPBE PT.  
PERMATA di Wilayah Jalan Tukiyat, Desa  
Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten  
Magelang ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

24 P - 24 : Persetujuan Masyarakat Bumirejo terhadap  
pendirian Stasiun Pengisian dan  
Pengangkutan Bulk Elpiji oleh PT. PERMATA  
di Dusun Pedak, Desa Bumirejo Kecamatan  
Mungkid, Kabupaten Magelang dari masyarakat  
Dusun Pedak, Dusun Tiban, Dusun Sanggrahan,  
Dusun Pucangan, Dusun Nampun dan Dusun  
Kawungon ( Fotocopy sesuai  
fotocopynya);- -----

25 P - 25 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Magelang Nomor :660.1/26/21/2008  
tanggal 31 Mei 2008, Perihal Rekomendasi  
Kelayakan Lingkungan kepada PT. PERMATA  
( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

26 P - 26 : Akta Pengikatan jual beli Nomor: 01 tanggal  
3 Juli 2007 antara DIAH AGUSTINA selaku  
Penjual dengan LINAWATY selaku Pembeli yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Georgius Ivo Marius Eliasar,  
SH. Notaris di Magelang ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

27 P – 27 : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 02 tanggal  
3 Juli 2007 antara DIAH AGUSTINA SELAKU  
Penjual dengan ANTON selaku Pembeli yang  
dibuat oleh Georgius Ivo Marius Eliasar,  
SH. Notaris di Magelang. ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

28 P – 28 : Surat Pernyataan tidak keberatan tanggal 3  
Juli 2009 dari Anton dan Linawati yang  
berbatasan (tetangga) dengan usaha  
pendirian Stasiun Pengisian dan  
Pengangkutan Bulk Elpiji PT. PERMATA  
( Fotocopy sesuai aslinya);- -----

29 P – 29 : Surat Gubernur Jawa Tengah No.504/1593  
tanggal 10 Agustus 2009. Perihal  
Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah  
ke LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Tengah.  
( Fotocopy sesuai  
fotocopinya);- -----

30 P – 30 : Buku Tanah Hak Milik No. 302/Desa Bumirejo  
atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai  
fotocopinya);- -----

31 P – 31 : Buku Tanah Hak Milik No. 1448/Desa Bumirejo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 32 P – 32 : 33. P – 33 : Sertipikat Hak Milik No. 1969/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 33 P – 33 : Sertipikat Hak Milik No. 1970/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 34 P – 34 : Sertipikat Hak Milik No. 02477/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 35 P – 35 : Sertipikat Hak Milik No. 02478/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 36 P – 36 : Sertipikat Hak Milik No. 02479/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 37 P – 37 : Sertipikat Hak Milik No. 02522/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 38 P – 38 : Sertipikat Hak Milik No. 02523/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 39 P – 39 : Sertipikat Hak Milik No. 02524/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----
- 40 P – 40 : Sertipikat Hak Milik No. 02525/Desa Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy sesuai fotocopinya);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 P – 41 : Sertipikat Hak Milik No. 02526/Desa  
45. P – 45 : Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy  
sesuai fotocopinya);- -----
- 42 P – 42 : Sertipikat Hak Milik No. 02527/Desa  
Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy  
sesuai fotocopinya);- -----
- 43 P – 43 : Sertipikat Hak Milik No. 02528/Desa  
Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy  
sesuai fotocopinya);- -----
- 44 P – 44 : Sertipikat Hak Milik No. 02529/Desa  
Bumirejo atas nama DIAH AGUSTINA ( Fotocopy  
sesuai fotocopinya);- -----
- 45 P – 45 : Akta Sewa menyewa No. 20 tanggal 26 Agustus  
2009 antara DIAH AGUSTINA selaku yang  
menyewakan dengan PT. PERMATA yang dibuat  
oleh Georgius Ivo Marius Eliasar, SH.  
Notaris di Magelang ( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----  
-----
- 46 P – 46 : Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para  
pemegang Saham PT. PERMATA Berkedudukan di  
Bantul Nomor :06 tanggal 19 November 2008  
tentang Persetujuan Penjaminan Aset  
Perusahaan sebagai Agunan Kredit kepada  
Bank Rakyat Indonesia yang dibuat oleh  
GREGORIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH Notaris di  
Mungkid, Kabupaten Magelang ( Fotocopy  
sesuai aslinya);-



47 P - 47 : Akta Perjanjian Pembangunan Proyek SPBE  
2. T - 2 -----  
Nomor: 14 tanggal 23 Mei 2009 yang dibuat  
oleh GREGORIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH  
Notaris di Mungkid, Kabupaten Magelang  
( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

48 P - 48 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor :  
4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin  
Gangguan dan Izin Tempat Usaha; ( Fotocopy  
sesuai  
fotocopynya);- -----

**Menimbang, bahwa** untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti- bukti  
berupa fotocopy surat- surat yang ditandai T - 1 sampai  
dengan T- 10 yang telah dimateraikan dengan cukup dan  
telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotocopynya  
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. T - 1 : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000  
tentang Bangunan ( Fotocopy sesuai  
fotocopynya) ;- -----

2. T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor :21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan  
Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang ( Fotocopy sesuai fotocopynya) ;- ----

3. T - 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Retribusi  
ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha  
( Fotocopy sesuai  
fotocopynya);- -----

4. T - 4 : Peraturan Bupati Magelang Nomor : 30 Tahun





2005 tentang Pendelegasian wewenang  
penyelenggaraan dan atau Penandatanganan  
Pelayanan Umum di Kabupaten Magelang

9. T - 9 ----- Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

5. T - 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor  
: 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Lembaga Lain ( Fotocopy sesuai  
fotocopynya);- -----

6. T - 6 : Peraturan Bupati Magelang Nomor : 31  
Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan  
Struktural pada Badan Pelayanan  
Perijinan Terpadu Kabupaten  
Magelang  
( Fotocopy sesuai  
aslinya);- -----

7. T - 7 : Surat Camat Mungkid Nomor :  
045/142/44/2003 tanggal 20 April 2003  
Perihal Laporan hasil Keputusan Musyawarah  
warga desa Bumirejo ( Fotocopy  
sesuai  
fotocopynya);- -----

8. T - 8 : Berita acara hasil keputusan musyawarah  
terhadap akan dibangunnya tempat pengisian  
SPBE/ELPIJI di Desa Bumirejo Kecamatan  
Mungkid Kabupaten Magelang tertanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 ( Fotocopy sesuai

fotocopynya);- -

9. T – 9 : Daftar hadir warga desa pada pertemuan di  
Balai Desa Bumirejo tanggal 18 April 2009

( Fotocopy sesuai

fotocopynya);- -----

-----

10 T – 10 : Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan  
Terpadu Kabupaten Magelang Nomor:  
88.4/1437/59/2009 tanggal 29 Juni 2009

perihal Pembatalan Dokumen

Perijinan ( Fotocopy sesuai

fotocopynya);- -----

**Menimbang, bahwa** kedua belah pihak tidak mengajukan  
saksi dalam perkara

ini;- -----

-----

**Menimbang, bahwa** kedua belah pihak telah menyerahkan  
kesimpulan dalam perkara ini, masing-masing tertanggal 16  
Desember 2009;- -----

**Menimbang, bahwa** untuk mempersingkat uraian putusan ini  
maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persiapan  
dan Berita Acara Persidangan telah dianggap menjadi satu  
kesatuan dalam putusan ini selanjutnya para pihak mohon  
putusan;- -----

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seperti tersebut  
diatas;- -----  
----- I z i n -----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam  
sengketa in casu adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor  
: 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 tentang  
Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian Izin Gangguan  
(HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA (vide bukti  
P-1);- -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat  
mengeluarkan Surat Keputusan a quo telah terbukti  
bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor  
4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat  
Usaha dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan  
Yang Baik yaitu melanggar asas kecermatan dan asas kepastian  
hukum;- -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh  
Tergugat dalam jawabannya tertanggal 2 Desember 2009 dengan  
alasan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek  
sengketa adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4  
Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Izin  
Tempat Usaha dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 48, sedangkan pihak Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-

15;- -----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;- -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----  
-----

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang dipergunakan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (selanjutnya disebut dengan Perda No. 4 Tahun 2005);- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap pendirian tempat usaha di lokasi tertentu, yang dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya, kerugian atau gangguan wajib memiliki izin gangguan;  
selanjutnya pada ketentuan pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa  
syarat- syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3  
ayat (1) bagi Perusahaan Industri  
adalah :-

1. Fotocopy izin lokasi/izin  
prinsip;-
2. Fotocopy KTP pimpinan/pemilik  
perusahaan;-
3. Fotocoy NPWPD perusahaan yang  
bersangkutan;-
4. Fotocopy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang  
berstatus Badan atau Anggaran Dasar yang sudah  
disahkan bagi  
koperasi;-
5. Fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB) tahun terakhir sesuai tempat peruntukan  
tanah/penggunaan sebagai lahan industry;-
6. Fotocopy sertipikat atas tanah/bukti kepemilikan atas  
tanah, bukti perolehan/ penguasaan atas  
tanah;-
7. Rancangan tata letak Instalasi Mesin/peralatan dan  
perlengkapan bangunan industry yang telah disetujui



oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang  
dikuasakan;-

-----  
-----  
Adalah -----

8. Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat  
yang berdekatan dan berada di sekitar  
lokasi;-

-----

9. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar  
bahan baku/penunjang dan bagan alur pengolahan  
limbah;-

-----

10. Legalisasi dan pertimbangan kepala desa/kelurahan dan  
para pejabat wilayah  
setempat;-

-----

11. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan, pembuatan  
dokumen upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan  
lingkungan;-

-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan angka 8 pada pasal  
tersebut di atas, yang berbunyi : ' *Persetujuan tertulis para  
tetangga **atau** masyarakat yang berdekatan dan berada di  
sekitar lokasi* ', Pengadilan berpendapat bahwa terdapatnya  
kata '**atau**' dalam redaksi angka 8 pada Pasal 4 ayat (1)  
tersebut adalah merupakan bentuk syarat pilihan atau  
alternatif dan bukan merupakan syarat kumulatif sehingga  
publik dapat memilih salah satu daripada syarat yang  
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) angka 8 tersebut, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiadaan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dijadikan tempat usaha tidak dapat dinyatakan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005 oleh karena telah terdapat persetujuan masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi; akan berbeda halnya jika kata sambung yang digunakan dalam redaksional angka 8 tersebut adalah kata **'dan'**, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 8 akan merupakan syarat kumulatif atau limitatif yang harus dipenuhi dan bukan merupakan syarat alternatif atau pilihan, oleh karenanya ketiadaan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dijadikan tempat usaha dapat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin gangguan (HO)/tempat usaha kepada Tergugat yang selanjutnya oleh Tergugat diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (selanjutnya disebut Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha);- -----

Menimbang, bahwa dari fakta bukti P-18 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam pengajuan permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha, Penggugat telah memenuhi semua persyaratan mengenai permohonan izin bagi perusahaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perda No. 4 Tahun 2005 hingga terbitlah Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha dari Tergugat tersebut (vide bukti P-18) dan terhadap penentuan lokasi akan dibangunnya SPPBE PT. PERMATA telah mendapat persetujuan Tergugat yaitu di lokasi Dusun Pedak Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid (vide bukti P-14);- -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha ditetapkan mengenai keberlakuan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha yaitu berlaku selama perusahaan berdiri dengan kewajiban daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat dicabut apabila : a) atas permintaan sendiri; b). Pemegang izin memberikan keterangan/data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin; c). pemegang izin menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan; d). karena perkembangan/perubahan wilayah sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan izin; dan e). melimpahkan atau memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Bupati (vide bukti P-18 bagian menetapkan keempat dan ketiga) hal mana diatur pula dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005;- -----

Menimbang, bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha, maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Izin mendirikan Bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat hingga diterbitkanlah Keputusan Bupati  
Magelang Nomor : 188.4/640/2094/Kep.34/2008 tentang Izin  
Usaha -----  
Mendirikan Bangunan (vide bukti P-  
17);- -----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus Tahun  
2009, Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat  
Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh Tergugat  
dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :  
188.4/504/1846/KEP/59/2009 tentang Pencabutan Keputusan  
Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/KEP/34/2008 tentang  
Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha *in casu*  
obyek gugatan (bukti P-1);- -----

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang Surat  
Keputusan Pencabutan oleh Bupati (bukti P-1) *in casu* obyek  
gugatan huruf b disebutkan bahwa dasar pencabutan Surat  
Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha Penggugat  
oleh Tergugat adalah Penggugat telah memberikan  
keterangan/data tidak benar pada waktu mengajukan permohonan  
izin yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada di  
sekitar rencana pembangunan SPPBE tidak sesuai dengan yang  
ada di lokasi sehingga Penggugat dinyatakan telah melanggar  
ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c Perda No. 4 Tahun 2005;  
-----

Menimbang, bahwa dasar alasan pencabutan oleh Tergugat  
sebagaimana tersebut di atas dilandasi adanya Surat Camat  
Mungkid, Surat Kepala Desa Bumirejo dan Kepala Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu (Vide konsideran membaca obyek gugatan (bukti P-

1);- -----

---

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10 yang pada intinya adalah bahwa warga Desa Bumirejo sepakat secara bulat menolak atau tidak setuju atas didirikannya SPPBE milik Penggugat, sehingga Tergugat sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat telah memberikan keterangan/data tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin yaitu data pemilik tanah yang berbatasan dan berada di sekitar rencana pembangunan SPPBE tidak sesuai dengan yang ada di lokasi sehingga Penggugat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c Perda No. 4 Tahun 2005 dan pada akhirnya sampailah pada keputusan untuk mencabut Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha Penggugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama bukti T-8 berupa Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah yang dibuat oleh 2 (dua) orang anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa Bumirejo, saudara DJUPRI, dan T-9 berupa daftar hadir rapat musyawarah hari Sabtu tanggal 18 April 2009 yang juga dihadiri oleh Kades Bumirejo, yang pada intinya menghasilkan suatu keputusan menyatakan masyarakat tidak setuju atas didirikannya SPPBE oleh PT. PERMATA;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Menimbang, bahwa di dalam daftar hadir rapat musyawarah hari Sabtu tanggal 18 April 2009 (bukti T-9) diperoleh fakta bahwa peserta rapat musyawarah yang hadir adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;-----

Menimbang, bahwa wilayah Desa Bumirejo terdiri dari 6 (enam) buah dukuh, yaitu Dukuh Pedak, Dukuh Tiban, Dukuh Sanggrahan, Dukuh Pucangan, Dukuh Nampian dan Dukuh Kawungon (vide bukti P-24);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-24 berupa Persetujuan Masyarakat Bumirejo yang terdiri dari masyarakat Dukuh Pedak, Dukuh Tiban, Dukuh Sanggrahan, Dukuh Pucangan, Dukuh Nampian dan masyarakat Dukuh Kawungon yang keseluruhan berjumlah 432 (empat ratus tiga puluh dua) warga masyarakat Desa Bumirejo dan telah pula dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing warga masyarakat keenam Dukuh yang berada di Desa Bumirejo menunjukan adanya persetujuan dari masyarakat terdekat, sedangkan bukti P-23 berupa surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun tempat didirikannya SPPBE oleh PT. PERMATA serta pula oleh Kepala Desa Bumirejo Saudara DJUPRI dengan dibubuhi stempel atau cap dinas kepala desa, yang isinya menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan terhadap adanya SPPBE PT. PERMATA;-----

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut, bukti P-23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-24 menunjukkan bahwa pada saat pengajuan permohonan telah melampirkan syarat sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) angka 8 yaitu adanya persetujuan masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi, sehingga berdasar bukti P-23 dan P-24 tersebut tidaklah dapat dikatakan bahwa Penggugat telah memberikan keterangan/data yang tidak benar pada waktu pengajuan permohonan izin tetapi Kades Bumirejo lah yang telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu semula memberikan pernyataan setuju dan tidak keberatan (vide bukti P-23) namun dikemudian hari, tanggal 18 April 2009, menyatakan tidak setuju (vide bukti T-8 dan T-9);- -----

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap proses permohonan izin gangguan (HO) dan izin tempat usaha yang diajukan Penggugat telah dilampiri dengan persetujuan dari masyarakat Bumirejo yang terdiri dari masyarakat Dukuh Pedak, Dukuh Tiban, Dukuh Sanggrahan, Dukuh Pucangan, Dukuh Nampan dan masyarakat Dukuh Kawungon (bukti P-24) serta pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun tempat didirikannya SPPBE oleh PT. PERMATA sertapula oleh Kepala Desa Bumirejo Saudara DJUPRI dengan dibubuhi stempel atau cap dinas kepala desa (bukti P-23) dan pada saat telah dilaksanakannya izin oleh Penggugat muncul surat hasil rapat (vide bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10) yang intinya menolak atau tidak setuju atas didirikannya SPPBE milik Penggugat menunjukan adanya dua pernyataan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan yang keduanya berasal dari pernyataan yang diketahui dan ditandatangani Kades Bumirejo, sehingga menurut Pengadilan haruslah dilakukan pemeriksaan melalui klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu terhadap kedua pernyataan yang bertentangan tersebut oleh Tergugat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan setelah diperoleh hasil klarifikasi dan verifikasi terhadap pernyataan yang bertentangan tersebut barulah Tergugat mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;- -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang merespon begitu saja pernyataan Kades Bumirejo yang semula menyatakan setuju dan tidak keberatan (vide bukti P-23) sehingga terbitlah Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (bukti P-18) namun dikemudian hari menyatakan tidak setuju (vide bukti T-8 dan T-9), telah menciptakan ketidak pastian hukum bagi pemegang perizinan, oleh karena izin dapat dicabut jika terdapat pernyataan yang muncul dikemudian hari setelah diterbitkannya surat izin yang bersangkutan dengan mendasarkan adanya keterangan/data tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin dengan keterangan/data yang baru muncul kemudian;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa izin dapat dicabut apabila pemegang izin memberikan keterangan/data yang tidak benar pada saat mengajukan permohonan izin;- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mencabut suatu izin oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk salah satunya sebagaimana dalam huruf c yaitu apabila pemegang izin memberikan keterangan/data yang tidak benar pada saat mengajukan permohonan izin dan apabila pemegang izin bukan merupakan pihak yang memberikan keterangan/data tidak benar, maka Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak berwenang mencabut izin dimaksud;- -----

Menimbang, bahwa penjelasan terhadap ketentuan Pasal 15 dalam Perda No. 4 Tahun 2005 adalah cukup jelas, sehingga tafsiran atas pasal tersebut mengikuti bunyi daripada pasal tersebut yaitu pemegang izin lah yang memberikan keterangan/data yang tidak benar pada saat mengajukan permohonan izin dan bukan pihak lain di luar pemegang izin;- -----

--

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 15 ayat (1) huruf c tersebut di hubungkan dengan bukti P-23 sebagai salah satu kelengkapan syarat permohonan izin, jika pernyataan atau keterangan sebagaimana bukti P-23 tidak benar maka yang memberikan keterangan tidak benar adalah Kades Bumirejo dan bukan Penggugat, oleh karena yang membuat isi keterangan atau data tersebut adalah Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan Kades Bumirejo;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa secara administrasi pada saat itu (pada saat diajukannya permohonan izin oleh Penggugat)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2005 dan tentunya telah melalui proses penelitian dan verifikasi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, jika dilihat dari substansi Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha (bukti P-18) dan Surat Pencabutan Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha *in casu* obyek gugatan (bukti P-1) diperoleh fakta hukum bahwa pemberian Izin HO diberikan kepada PT. PERMATA dengan pemohon Bagio Wibowo [vide bagian menetapkan PERTAMA bukti P-18 jo. Bagian menimbang huruf b obyek gugatan (P-1)] sedangkan pencabutan pemberian izin oleh Tergugat ditujukan kepada Bagio Wibowo (vide bagian menetapkan KESATU (bukti P-1));- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/KEP/34/2008 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha diberikan kepada PT. PERMATA dan bukan diberikan kepada Bagio Wibowo, sehingga dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa obyek gugatan telah terdapat kecacatan yuridis dalam pernyataan : *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhadap Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/504/2111/KEP/34/2008 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama Bagio Wibowo*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan azas keadilan, - azas-keadilan sebelum keputusan disampaikan serta azas keadilan oleh karenanya perbuatan Tergugat secara umum telah bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah dinyatakan bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dinyatakan berdasar hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107, maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 maka terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;- -----

----- Demi ki an -----

Memperhatikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo.  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan  
dengan perkara

ini;- -----

-

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.4/504/1846/ KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009  
tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :  
188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian Izin  
Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas nama PT.  
Permata;- -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati  
Magelang Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8  
Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati  
Magelang Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang  
Pemberian Izin Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha atas  
nama PT.  
Permata;- -----

4. Menghukum Tergugat biaya perkara sebesar Rp. 86.000,- .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh Enam Ribu  
Rupiah);- -----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari  
SENIN tanggal 21 Desember 2009 oleh kami R.  
BASUKI SANTOSO, SH sebagai Ketua Majelis, ANNA LEONORA  
TEWERNUSA, SH dan OENOE PRATIWI, SH masing-masing sebagai  
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 Desember 2009  
oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh WWI  
WIDIASTUTI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa  
Tergugat .

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**R. BASUKI SANTOSO, SH**

**1. ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH**

**2. OENOE PRATIWI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**



**WWI WIDIASTUTI, SH**

**Perincian Biaya :**

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan       | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah | Rp. 45.000,-       |
| 3. Meterai Putusan                 | Rp. 6.000,-        |
| 4. Redaksi Putusan                 | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah                             | Rp. 86.000,-       |

(Delapan puluh enam ribu rupiah)